

Dosen: Prof. Dr. Ir. Rudi C Tarumingkeng, MF.
Prof. Dr. Ir. Zahrial Coto, MSc
Dr. Ir. Hardjanto, MS

SOLUSI ALTERNATIF PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DIKAWASAN KEPULAUAN SERIBU PROPINSI DKI JAKARTA (*An alternative Solution for Sustainable Development in Kepulauan Seribu, DKI Province , Jakarta*)

Oleh;

Ariadi Noor

C261040121/SPL
ariadinoor@yahoo.com

Abstract

The research aimed to (a) analyze scenario of optimal exploiting in development Marine Culture in Thousand Islands, (b) knowing of cause spatial use conflicts and authority, (c) knowing function and authority from each every government agency in concerned resources management in Thousand Islands pursuant to rule existing legislation, and (d) formulate alternative of policy development integrated and sustainable of marine culture.

The results of this research showed that there are spatial use conflicts and authority in management of area Thousand Islands. Futhermore, the result showed the mose suitable area in Thousand Islands as development marine culture, maritime tourisme and conservation executed in the merger or integrated. Alternative of policys which can be executed composed by four pillar of policy and eighteen program of development that is development of maritime tourisme, development of marine culture, environmental conservation of island and territorial water and development of aksesibilitas and institution capacities.

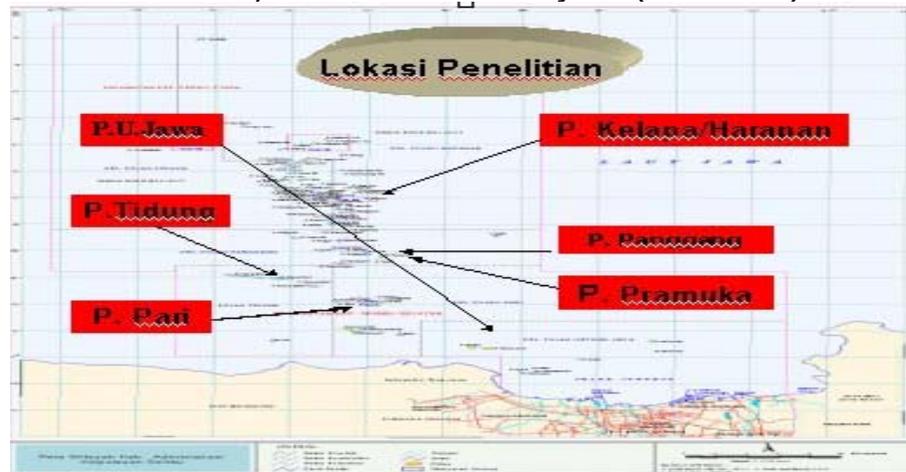
PENDAHULUAN

Kepulauan Seribu yang sekarang ditetapkan menjadi Kabupaten Administratif di Propinsi DKI Jakarta merupakan salah satu kawasan Taman Nasional Laut yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Keunikan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu adalah ekosistem pesisir dengan terumbu karang yang dimilikinya. Ekosistem pesisir mempunyai produktivitas dan keanekaragaman jenis biota yang tinggi.

Pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan kawasan pulau-pulau kecil di Kawasan Kepulauan Seribu diarahkan pada kesejahteraan masyarakat merupakan suatu proses yang akan membawa suatu perubahan pada sumberdaya alam. Perubahan-perubahan tersebut akan membawa pengaruh pada lingkungan hidup. Semakin tinggi intensitas pengelolaan dan pembangunan yang dilaksanakan semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan sumberdaya dan perubahan-perubahan lingkungan yang akan terjadi di kawasan pulau-pulau kecil tersebut. Oleh karena itu diperlukan strategi dan kebijakan dalam pengelolaannya.

Strategi dan kebijakan pengelolaan, diharapkan mampu menjadi sebuah kesepakatan bersama dan sebagai pedoman dalam mengatur, mengarahkan serta mengendalikan berbagai

aktivitas masyarakat dalam upaya pemanfaatan sumberdaya kawasan pesisir di kepulauan secara terpadu (*integrated*) dan lestari Dengan demikian sumberdaya pesisir akan mampu menunjang kegiatan investasi dan usaha masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*).



Peta Wilayah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu Prop. DKI Jakarta

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan

Berdasarkan arah dan kebijaksanaan dari pembangunan wilayah pesisir dan lautan yang ditegaskan dalam GBHN tahun 1993, maka kebijaksanaan pembangunan kelautan diarahkan untuk mendukung antara lain : (1) penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional, (2) mendayagunakan potensi sumberdaya laut dan dasar laut, (3) mengembangkan potensi berbagai industri kelautan nasional dan penyebarannya di seluruh wilayah tanah air, (4) memenuhi kebutuhan data dan informasi pesisir dan kelautan serta memadukan dan mengembangkannya dalam suatu jaringan sistem informasi kelautan, (5) mengembangkan organisasi dan kelembagaan kelautan sehingga terwujud sistem pengelolaan yang terpadu, serasi, efektif dan efisien, dan (6) mempertahankan daya dukung serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Konflik Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan

Meningkatnya kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan lautan, akan mendorong terjadinya konflik pemanfaatan dan konflik pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan tersebut. Konflik tersebut didominasi oleh isu-isu dan hak kepemilikan suatu jenis sumberdaya di kawasan tertentu.

Konflik dapat terjadi karena ada lima pemicu utama, yaitu (1) konflik hubungan (*relation conflict*), (2) konflik data (*data conflict*), (3) konflik nilai (*value conflict*), (4) konflik kepentingan (*interest conflict*), dan (5) konflik struktural (*structural conflict*). *Konflik hubungan* mengacu pada konsep bahwa konflik terjadi karena adanya hubungan disharmonis yang disebabkan oleh beberapa factor seperti salah paham, tidak adanya komunikasi, perilaku emosional dan stereotypes. *Konflik data* yaitu suatu keadaan dimana pihak-pihak yang bersangkutan tidak mempunyai data dan informasi tentang perihal yang dipertentangkan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa. *Konflik nilai* adalah suatu kondisi dimana pihak-pihak yang berurusan mempunyai nilai-nilai yang berbeda yang melandasi tingkah lakunya masing-masing dan tidak diakui kebenarannya oleh pihak yang lain. *Konflik nilai* ini termasuk cara-cara penyelesaian permasalahan yang ditempuh, agama, dan ideology. *Konflik kepentingan* adalah pertentangan mengenai substansi atau pokok permasalahan yang diperkarakan, kepentingan prosedur dan psikologis. *Konflik struktural* adalah keadaan dimana secara struktural atau suatu keadaan diluar kemampuan kontrolnya pihak-pihak yang berurusan mempunyai perbedaan status kekuatan, otoritas, klas, atau kondisi fisik yang berimbang.

Karakteristik Sumberdaya Pesisir (*coastal resources characteristic*)

Sumberdaya alam wilayah pesisir dan lautan mempunyai karakteristik yang relatif berbeda dan lebih kompleks dibandingkan dengan sumberdaya alam di daratan. Sumberdaya alam pesisir dapat diklasifikasikan dari jenis yaitu (1) sumberdaya tidak pernah habis (*renewable-perpetual resources*), (2) sumberdaya alam yang tidak bisa diperbaharui (*non-renewable or exhaustible resources*), , (3) sumberdaya alam yang secara potensial dapat diperbaharui (*potentially renewable resources*) yaitu sumberdaya yang jika dimanfaatkan tidak melampaui batas-batas daya dukung.

Ekosistem wilayah pesisir dan lautan dipandang dari dimensi ekologis memiliki 4 fungsi pokok bagi kehidupan umat manusia yaitu (1) sebagai penyedia sumberdaya alam sebagaimana dinyatakan diatas, (2) penerima limbah, (3) penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan manusia (*life support services*), (4) penyedia jasa-jasa kenyamanan (*amenity services*) (Bengen, 2001).

Karakteristik Pulau-Pulau Kecil (*small islands characteristic*)

Secara umum pulau-pulau kecil atau Gugusan Pulau-pulau Kecil dapat didefinisikan adalah kumpulan pulau-pulau yang secara fungsional saling berinteraksi dari sisi ekologis, ekonomi, social dan budaya, baik secara individual maupun secara sinergis dapat meningkatkan skala ekonomi dari pengelolaan sumberdayanya.

Kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi pembangunan yang cukup besar karena didukung oleh adanya ekosistem dengan produktivitas hayati tinggi seperti terumbu karang, padang lamun (*sea grass*), rumput laut (*seaweeds*) dan hutan bakau (*mangrove*). Sumberdaya hayati laut pada kawasan ini memiliki potensi keragaman dan nilai ekonomis yang tinggi seperti kerapu, napoleon, ikan hias, kuda laut, kerang mutiara, kima raksasa (*Tridacna gigas*), dan teripang. Selain itu pulau-pulau kecil juga memberikan jasa-jasa lingkungan yang tinggi nilai ekonomisnya dan sekaligus sebagai kawasan berlangsungnya kegiatan kepariwisataan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Konflik Pemanfaatan dan Kewenangan

Konflik yang terjadi di Kawasan ini yang terjadi antara institusi pemerintah lebih banyak disebabkan oleh adanya kurang memahaminya tugas, fungsi dan kewenangan dan perbedaan interpretasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas, fungsi dan kewenangan dari lembaga tersebut. Benturan kepentingan dan keinginan serta ego sektoral yang terjadi diantara instansi dan lembaga yang berperan dalam pengelolaan kawasan Kepulauan Seribu tidak terlepas dari belum adanya pembagian kewenangan yang jelas dan tegas baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah maupun antara instansi yang berada di jajarannya yang berkaitan dengan kewenangan terhadap fungsi (1) perijinan, (2) perencanaan, dan (3) fungsi pengawasan dan pengendalian yang cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi dengan instansi lain sehingga seringkali terjadi overlapping tugas dan kewenangan dan duplikasi kebijakan sehingga program kerja yang dijalankan tidak berjalan secara efektif dan efisien yang mengena pada sasaran pembangunan.

Bentuk konflik yang terjadi antara lain : (A) Konflik kewenangan : (1) pemberian ijin usaha pariwisata dan perikanan, (2) pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, (3) pembangunan sarana dan prasarana budidaya laut, (4) pemberdayaan masyarakat kepulauan, (5) penegakan hukum dan peraturan. (B) Konflik pemanfaatan : (1) Pemanfaatan untuk kegiatan pariwisata, (2) Pemanfaatan untuk kegiatan perikanan (penangkapan/budidaya laut), (3) Pemanfaatan untuk kegiatan konservasi.

Kebijakan dalam Pengembangan Kawasan Kepulauan Seribu dan sekitarnya

A. Kebijakan Pengembangan Pariwisata Bahari.

Kebijakan pengembangan pariwisata bahari dapat aplikasikan dengan menerapkan 5 (lima) program antara lain :

Peningkatan kondisi pulau yang diperuntukan wisata bahari, meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan pemilik resort pulau wisata, pengembangan SDM lokal untuk pariwisata,

peningkatan promosi wisata bahari secara nasional, regional dan internasional, dan pengembangan wisata bahari yang ramah lingkungan (*ecotourism*) Kepulauan Seribu yang merupakan suatu kawasan konservasi, maka pola pengembangan pariwisata adalah pariwisata bahari yang ramah lingkungan (*eco-tourism*) agar antara pemanfaatan dan keseimbangan lingkungan dapat terjaga.

B. Kebijakan Pengembangan Budidaya Laut/Marikultur

Kebijakan pengembangan budidaya lauti dapat diimplementasikan dalam 4 (empat) program kerja antara lain :

Pengembangan komoditas budidaya laut yang beragam dan *aplikable* untuk masyarakat kepulauan sesuai permintaan pasar, implementasi zonasi pemanfaatan budidaya laut secara konsisten, penerapan teknologi budidaya laut yang ramah lingkungan, pembentukan akses pasar dan akses ke lembaga keuangan (KUD, KUT dan Perbankan)

Sistem usaha budidaya laut/marikultur yang mampu menghasilkan produk berdaya saing tinggi, menguntungkan, berkeadilan, dan berkelanjutan maka pengembangannya harus didasarkan pada (1) potensi dan kesesuaian kawasan (toleran terhadap fluktuasi kualitas perairan) untuk suatu jenis komoditas, (2) kemampuan dan aspirasi masyarakat setempat dalam mengadopsi dan menerapkan teknologi yang mudah, murah agar masyarakat dapat mengaplikasikan secara masal, (3) dan pendekatan sistem bisnis perikanan budidaya secara terpadu (*integrated marine culture*).

C. Kebijakan Konservasi Pulau dan Lingkungan Perairan

Kebijakan konservasi dapat diimplementasikan dalam 4 (empat) program kerja yaitu :

Penerapan kawasan konservasi secara konsisten didalam RTRW, penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan transparan, peningkatan pemahaman tentang konservasi melalui pendidikan dan penyuluhan, dan Peningkatan kesadaran tentang Sanitasi dan kebersihan lingkungan

Pembangunan wilayah pesisir berkaitan erat dengan upaya optimalisasi pemanfaatan berbagai peruntukan termasuk usaha komersial, rekreasi dan wisata, perikanan tangkap dan budidaya. Umumnya aktifitas tersebut berada pada daerah yang sama sehingga terjadi benturan kepentingan, terutama aktifitas yang membutuhkan kualitas lingkungan yang spesifik. Oleh karena itu penanganan lingkungan ini harus dilakukan secara bersama-sama dan terpadu (*integrated*).

D. Kebijakan Pengembangan Aksesibilitas dan Kapasitas Kelembagaan

Kebijakan pengembangan aksesibilitas dan kapasitas kelembagaan dapat aplikasikan dengan menerapkan 5 (lima) program antara lain :

Peningkatan peran LSM, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi dalam penelitian dan pendampingan, peningkatan profesionalitas aparat pengelola secara teknis dan manajerial, peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam prinsip *Co-Management*, mendefinisikan kembali tugas, fungsi dan mekanisme koordinasi institusi dalam pengelolaan terpadu (*integrated management*), dan peningkatan aksesibilitas internal dan eksternal dengan penambahan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi.

Pendekatan Co-management

Pada hakekatnya kebijakan pembangunan sumberdaya pesisir dan lautan dari hasilkan dari proses politik, dalam pengertian, bahwa kebijakan tersebut tersusun dan diimplementasikan melalui proses negosiasi antar berbagai *stakeholders*. Oleh karena itu, keberhasilan segenap kaidah pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada kemauan dan komitmen segenap *stakeholders* tersebut.

Agar *stakeholders* terdorong keinginannya memiliki minat dan komitmen politik dalam pembangunan maka pendekatan pembangunan masa lalu yang sentralistik dan top-down harus diubah dengan pendekatan pembangunan yang bersifat partisipatif. Pengelolaan bersama antar pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal (LSM) sudah saatnya diterapkan.

Co-management didefinisikan sebagai pembagian tanggungjawab dan wewenang antara pemerintah dengan pengguna sumberdaya alam lokal (masyarakat) dalam pengelolaan sumberdaya alam, sehingga seharusnya merupakan gabungan antara pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat lokal sebagai subyek pengelolaan sumberdaya alam, sejak perencanaan hingga evaluasi pengelolaan.

Implementasi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu (*Integrated Coastal Zone Management/IZCM*)

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau meminimalisir atau menghindari terjadinya konflik dalam pengelolaan sumberdaya Kawasan Kepulauan Seribu adalah dengan melakukan pendekatan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu (*Integrated Coastal Zone Management*).

Keterpaduan (*integration*) mengandung tiga dimensi : sektoral, bidang ilmu dan keterkaitan ekologis. Keterpaduan secara sektoral berarti perlu adanya koordinasi tugas, wewenang dan tanggungjawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintah tertentu (*horizontal integration*); dan antar tingkat pemerintahan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, sampai tingkat pusat (*vertical integration*). Keterpaduan sudut keilmuan mensyarakatkan bahwa didalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin (*interdisciplinary approaches*). Sedangkan keterkaitan ekologis bahwa wilayah pesisir pada dasarnya tersusun dari berbagai ekosistem (mangrove, terumbu karang, estuaria, pantai berpasir dan lainnya) yang satu sama lain saling terkait, tidak berdiri sendiri.

KESIMPULAN

Dari penjelasan seperti tersebut diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Kawasan Kepulauan Seribu dikelola bukan hanya sebagai suatu kawasan konservasi dan asset pariwisata (resort pulau) juga berpotensi besar untuk pengembangan budidaya laut, bila tidak dikelola secara arif dan bijaksana dan kekeliruan peruntukannya, akan sangat besar kemungkinan terjadinya kerusakan dan degradasi sumberdaya pesisir dan lautan yang dimilikinya. Untuk itu upaya-upaya tindakan preventif harus segera dilakukan dengan mencari dan menentukan alternatif pemanfaatan dan pengelolaan dalam kerangka pemanfaatan yang berkelanjutan (*sustainable use*).
- Dalam kerangka manfaat dan biaya, bahwa kawasan Kepulauan Seribu lebih optimal bila dikelola sebagai kawasan konservasi, pariwisata, dan budidaya laut/marikultur secara terpadu (*integrated*).
- Sistem koordinasi antar lembaga terkait baik koordinasi dari mulai tahap perencanaan program, implementasi sampai pada pemantauan dan evaluasi, dengan lebih merevitalisasi peran Badan Perencana Daerah agar azas keterpaduan (*integrated*) baik secara vertical maupun horizontal agar terciptanya kerjasama yang harmonis dan sinergis.
- Perlu lebih ditingkatkan kegiatan-kegiatan dalam upaya menumbuhkembangkan potensi masyarakat lokal, baik dalam pembentukan "Forum Rembuk Warga" agar tercipta peran serta masyarakat lokal dalam pembangunan.
- Perlu dilakukan study lebih detail dalam pembentukan *Marine Protected Area* (MPA) pada setiap pulau yang berbasis masyarakat lokal, baik yang diperuntukan untuk konservasi, budidaya laut maupun sekaligus sebagai daerah pengembangan wisata bahari.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.** 2001. Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat. Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta.
- Bengen. D.G, 2001. Sinopsis. Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut. PKSPL-IPB. Bogor.
- Cicin-Sain and Knecht R.W, 1998. *Integrated Coastal and Marine Management*, Island Press, Washington DC.
- Dahuri, R. et al, 1996. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT. Pramadya Paramita, Jakarta.
- Dahuri. R, 2003. Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Bidang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. IPB.
- Dunn, W.N. 1998. Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Ginting. S.P, 1998. Konflik Pengelolaan Sumberdaya Kelautan di Sulawesi Utara dapat Mengancam Kelestarian Pemanfaatannya. Jurnal Pesisir dan Lautan. Vol. 1 No.2. 1998, PKSPL-IPB Bogor.
- Nikijuluw, V.P.H, 2002. Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Diterbitkan atas kerjasama Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional (P3R) dengan PT. Pustaka Ciselindo. Jakarta Selatan.